

Perlindungan hukum anak dalam menetapkan hak asuh pasca perseraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2003

Dharmawati R, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269675&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Mengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama dalam perkawinan. Dalam hubungannya dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur antara lain oleh UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban mana tidak hanya pada masa perkawinan tetapi terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian dan kriteria ideal orang tua yang mendapatkan hak asuh bagi anaknya, serta kewajiban orang tua pemegang hak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif terhadap bahan hukum primer dan skunder yang dianalisis dengan metode kualitatif guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam bentuk evaluatif-analitis.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan hak asuh adalah pembuatan keputusan atas pilihan terhadap kedua orang tua yang bercerai setelah mempertimbangkan kemungkinan tercapainya pemenuhan hak-hak anak. Kriteria ideal untuk menjadi pemegang hak asuh adalah orang tua melakukan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak serta mampu memberikan perlindungan untuk terselenggaranya hak-hak anak sampai masuk usia dewasa atau menikah. Perlindungan terhadap anak dari orang tua pemegang hak asuh meliputi tetapi tidak terbatas atas perlindungan untuk menjalankan agamanya, terselenggaranya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya sehingga anak dapat berkembang baik fisik maupun rohaninya. Disarankan adanya lembaga konsultasi keluarga yang menangani persiapan pengasuhan anak pasca perceraian dan mengoptimalkan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

<hr>

ABSTRACT

The importance of the marital institution for establishment and social welfare, the state must belong to the rule of law for arranging to coexist in marital institution. Related with the parents' obligation for their children care according to Code of The Marital Number 1 -1974 and Code of The Child Protection Number 23- 2002, not while their marriage only but continually although its broken. The main problems should be analyzed of the research are decision of child care right for one of the suitable parents after divorcing and also the obligation of one has been appoint to care her/his child according to Code of The Child Protection Number 23 - 2002. Methodological of research is the library research to collect the secondary data consist of the primary and secondary sources of data analyzed by qualitative method.

The result of research concludes found that decision to appoint a suitable parent to care her/his child after

the parents' divorce should consider the best child's rights. The best qualification of appointed fellow to care the child connects with he or she is able to fulfill the child's right and belong to competency in protecting and accomplishment the child's right until he and / or she reach the adulthood and/or before marriage. It's including to appraise her or his believability, accomplish the child's reasonable education as according to his or her talent. Suggested the existence of family consultancy institute for handling the families' trouble especially for parent and her or his child after divorcing.